**Tidak Ada Pesta yang Tak Usai**

**Oleh:**

**Darajat Wibawa\*)**

***“Tidak ada pesta yang abadi, dan tak ada pesta yang tak berakhir”.*** *Itulah rangkaian kalimat yang bisa kita temukan saat membaca buku Kisah Tragis Oei Hui Lan: Putri Orang Terkaya di Indonesia. Buku setebal lebih dari 300 halaman itu, mengisahkan tentang Oei Hui Lan, putri ke dua Raja Gula di tanah Jawa. Kekayaannya amat melimpah, sehingga dia disebut sebagai Putri Orang Terkaya di Indonesia (Hindia Belanda).*

*Oei Hui Lan hidup berpindah-pindah dari Asia ke Eropa, dan memiliki kebiasaan hidup yang boros dan hura-hura. Namun ternyata, finansial, emas berlian dan rumah mewah yang bisa memberikannya tertawa, ternyata tidak bisa membeli kebahagian yang ia inginkan karena pesta dan hura-hura itu harus usai. Tidak ada pesta yang abadi.*

Agnes Davonar (2011) sang penulis kisah Oei Hui Lan, hendak mendeskripsikan bahwa segala sesuatu tidak akan mungkin menjadi milik kita selamanya. Semuanya bisa hilang dan berakhir. Begitu juga dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung Rabu (17/4/2019) secara teknis harus segera berakhir. Pesta demokrasi lekat dengan segala jenis pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Umum pun menggunakan istilah pesta demokrasi dalam materi promosi Pemilu Serentak 2019. Pemilu untuk pertama kali dijuluki sebagai ***pesta demokrasi*** oleh Presiden Soeharto pada Pemilu 1982. "Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam," kata Soeharto kala itu.

John Pamberton pernah menuliskan dalam *"Notes on the 1982 General Election in Solo*" (1986) bahwa, mengingat Pemilu dianggap upacara rutin (yang kala itu pemenangnya sudah ketahuan sejak awal) pemerintah merasa perlu menjuluki Pemilu 1982 sebagai Pesta Demokrasi. Pesta dalam padangan Poerwadarminta (1987), adalah perayaan (bersuka ria), dan jika dikaitkan dengan kisah tragis Oei Hue Lan yang memaknai pesta sebagai hura-hura, maka pesta demokrasi yang ditunaikan masyarakat Indonesia Rabu (17/0/2019) itu seharusnya telah usai.

Namun nampaknya, seiring dilakukannya hitung cepat hasil Pemilu yang dilakukan para pihak, disusul saling klaim kemenangan sehingga suasana pesta demokrasi tampaknya belum memiliki tanda-tanda segera usai, bahkan jauh sebelum kampanye yang tadinya diperkirakan akan mencapai titik kulminasi ketegangan usai pencoblosan, sepertinya masih jauh dari kata usai, karena katidakrelaan yang berbuah ketegangan masih nampak dipelupuk mata, dengan demikian tidak menutup kemungkinan pula ujian terhadap bangsa ini semakin terlihatan jelas.

**Komunikasi dan Budaya Politik**

Indonesia dipenuhi berbagai kepentingan antarkelompok karena Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas berbagai kelompok agama, suku, ras, adat istiadat, golongan, kepentingan lalu membetuk partai politik sesuai dengan minat dan kepentingannya masing-masing yang mampu melahirkan ciri khas yang membedakan antara satu partai dengan partai lainnya.

Perbedaan itu kian meruncing manakala suasana Pemilu berada di hadapannya. Masing-masing memiliki kepentingan untuk merebut hegemoni dan kekuasaan. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi peningkatan suhu politik yang bisa mampu mengancam keutuhan negara. Komunikasi politik yang dibangun antar elit kelompok menjadi tidak sehat.

 Fenomena mengkhawatirkan tersebut tentu saja membutuhkan perhatian semua pihak agar Indonesia bisa kembali merajut persatuan. Publik perlu diarahkan pada pendidikan politik yang benar dan sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Elite politik perlu menjadikan komunikasi politik pada dimensi yang lebih strategis dengan cara membangun opini publik positif dan sehat dengan tujuan mencerdaskan publik tentang politik, perkataan lain komunikasi politik yang sehat menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Dalam praktiknya, komunikasi memiliki peranan penting dalam membentuk budaya komunikasi, dan budaya politik dibentuk melalui proses komunikasi. Mengutip ungkapan Edward T. Hall, *culture is communication*” dan *communication is ulture* mengisyaratkan bahwa, budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi.

Komunikasi dengan budaya bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses komunikasi terjadi interaksi antarindividu yang secara sadar akan saling mempengaruhi. Hasil dari proses interaksi dan adanya saling mempengaruhi ini menciptakan kebiasaan dan lahir suatu budaya yang diciptakan. Budaya tidak serta merta terbentuk begitu saja melainkan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula pada budaya politik suatu organisasi atau partai politik.

Diakui atau tidak, partai politik memiliki peran penting membentuk budaya politik. Budaya politik terbentuk melalui interaksi antarindividu. Oleh sebab itu, biarlah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertingi demokrasi, menunaikan “pestanya” dengan sukacita. Memafhumi bahwa pesta demokrasi yang dikuasakan kepadanya telah usai.

Biarlah rakyat menyatukan kembali kesatuan dan atas nama pesta demokrasi, biarlah rakyat menikmati kebebasan menyampaikan aspirasinya dalam beberapa menit di bilik suara. Biarlah mereka menyadari sebelumnya bahwa tidak ada pesta yang tidak pernah usai. Suatu kesadaran yang luput dimafhumi kisah Oey Hui Lan. (**\*Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).**

****